

ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN *WORK FROM HOME* DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dita Kurnia Utami Putri¹, T Herry Rachmatsyah², Harry Nenobais³

Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta
E-mail Korespondensi: putri.dita7998@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to analyze the implementation of policies, obstacles and efforts to make work from home policies more effective in order to improve employee performance at the Leadership Administration Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Home Affairs. The aim and purpose of this research is to determine the implementation of the work from home policy in improving employee performance at the Leadership Administration Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Home Affairs along with the obstacles and solutions implemented to overcome these obstacles. This research was carried out using a descriptive qualitative approach with a postpositivist approach design, namely a modification of the positivism approach. The informants in this research were 7 people from the Administrative Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Home Affairs. From the results of the research, conclusions were drawn, namely: (1) The implementation of the work from home policy in the Leadership Administration Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Home Affairs is in accordance with the assignment letter made for each employee with a predetermined schedule. The implementation of work from home also runs flexibly according to the workload of each employee. (2) Obstacles found in implementing the work from home policy at the Administrative Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Home Affairs include, among others, that there is still a lot of work that administratively cannot be carried out online, work coordination between units is hampered, and differences in the working atmosphere between those working in office by working from home. (3) Efforts made to improve employee performance during the implementation of the work from home policy at the Leadership Administration Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Home Affairs, include paying attention to employee work-life balance, avoiding excessive control over employee activities, guaranteeing access to technological devices, and regular employee performance evaluations.

Keywords: Policy, Work From Home, Employee Performance

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan, hambatan-hambatan dan upaya dalam mengefektifkan kebijakan *work from home* guna meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan *work from home* dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta hambatan dan solusi yang dilakukan guna mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan *postpositivisme*, yaitu modifikasi dari pendekatan *positivisme*. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang berasal dari Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: (1) Penerapan kebijakan *work from home* pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sudah sesuai dengan surat tugas yang dibuat bagi setiap pegawai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pelaksanaan *work from home* juga berjalan secara fleksibel disesuaikan dengan beban kerja masing-masing pegawai. (2) Hambatan yang ditemukan dalam

penerapan kebijakan *work from home* pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, antara lain masih banyak pekerjaan yang secara administratif belum bisa dilaksanakan secara daring, koordinasi kerja antar unit menjadi terkendala, dan perbedaan suasana kerja antara bekerja di kantor dengan bekerja dari rumah. (3) Upaya yang dilakukan guna meningkatkan kinerja pegawai selama penerapan kebijakan *work from home* pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, antara lain dengan memperhatikan *work-life balance* pegawai, menghindari kontrol yang berlebihan terhadap kegiatan pegawai, adanya garansi akses terhadap perangkat teknologi, dan adanya evaluasi kinerja pegawai secara berkala.

Kata Kunci: Kebijakan, Work From Home, Kinerja Pegawai

PENDAHULUAN

Penyebaran virus *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), yang semakin merebak di Indonesia, mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengambil langkah preventif untuk memutus rantai penularan Corona. Salah satunya adalah dengan menerapkan kerja dari rumah atau *Work from Home* (WFH). Kebijakan ini menyusul penetapan *World Health Organization* (WHO), yang menyampaikan bahwa penetapan Covid-19 sebagai pandemi global. Covid-19 yang menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia membuat negara Indonesia melakukan penetapan pandemi di seluruh wilayahnya. Masalah kesehatan yang dialami oleh rakyat Indonesia mendorong pemerintah mengambil kebijakan dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus ini dengan melakukan beberapa tindakan seperti salah satunya dengan pemberlakuan *social and physical distancing* (pembatasan interaksi antar individu dengan menerapkan jarak).

Social and physical distancing atau pembatasan interaksi secara fisik antar individu dengan menerapkan jarak ini memiliki dampak yang luas bagi

masyarakat secara umum. Ini terjadi karena aktivitas masyarakat dibatasi secara fisik untuk dapat mencegah penyebaran Covid-19 tersebut sesuai dengan imbauan dari Presiden, yang mengajak untuk semua lapisan masyarakat agar dapat melakukan kegiatan ataupun bekerja dari rumah untuk memutus rantai penularan virus Covid-19 ini.

Berdasarkan imbauan dari pemerintah dan proses pembatasan kegiatan yang melibatkan banyak orang akhirnya sebagian besar perusahaan-perusahaan milik negara maupun swasta menerapkan konsep *work from home* melalui kebijakan-kebijakan yang disepakati bersama bagi pegawainya untuk dapat tetap bekerja secara produktif dan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti penggunaan media *online* (internet, *video conference* ataupun aplikasi lain) yang dapat menghubungkan antar individu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan tanpa harus bertemu atau berinteraksi secara fisik.

Dari kondisi tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyampaikan kebijakan nasional

tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara selama merebaknya kasus Covid-19 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*Work from Home*) bagi Aparatur Sipil Negara sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran Covid-19.

Surat Edaran Menteri PAN-RB tersebut bertujuan untuk mencegah dan meminimalisasi penyebaran, serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi pada instansi pemerintah, dan memastikan pelaksanaan pelayanan publik di instansi pemerintah dapat tetap berjalan efektif. Hal tersebut juga tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden dan situasi yang terus berkembang

terkait penyebaran Covid-19, Kementerian Dalam Negeri juga menerapkan kebijakan *Work from Home* bagi seluruh jajarannya baik di pusat maupun di daerah melalui beberapa Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), diantaranya Inmendagri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; Inmendagri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali; dan beberapa Inmendagri lanjutan lainnya.

Biro Administrasi Pimpinan sebagai salah satu unit kerja pada Sekretariat Jenderal, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam penyiapan materi dan kebijakan pimpinan, urusan tata usaha pimpinan, dan urusan keprotokolan. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menghimbau para pegawainya untuk bekerja dari rumah dengan membagi jadwal kedinasan untuk pegawai, pengelola gedung, sekretaris, pimpinan dan layanan terkait. Hal ini dimaksudkan agar operasional kantor tetap berjalan dengan baik serta tetap

dapat memantau kinerja pegawai pada masa kerja *work from home*.

Konsep *work from home* adalah sebuah konsep kerja dimana pegawai dapat melakukan pekerjaannya dari rumah. Bekerja dari rumah juga memberikan jam kerja yang fleksibel bagi pegawai. Bekerja dari rumah sangat membantu untuk memberikan keseimbangan kehidupan kerja kepada pegawai, dan juga membantu organisasi menyelesaikan pekerjaan, sehingga dapat meminimalisir resiko penularan Covid-19 ini. Bekerja dari rumah akan memberikan waktu yang fleksibel untuk memberikan keseimbangan hidup bagi pegawai. Di sisi lain juga memberikan keuntungan bagi organisasi. Selain memberikan waktu yang fleksibel bagi pegawai, *work from home* juga digunakan untuk dapat memantau kinerja pegawai agar tetap produktif dalam menyelesaikan pekerjaan. Organisasi membutuhkan pegawai yang mampu bekerja lebih baik dan lebih cepat, sehingga diperlukan pegawai yang mempunyai kinerja yang tinggi.

Permasalahan yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, antara lain: capaian kerja pegawai belum maksimal; kebijakan *Work from Home* mengakibatkan pelaksanaan kegiatan kerja kurang maksimal; motivasi pegawai karena kebijakan *Work from Home* tidak diikuti pemberian penghargaan bagi pegawai sudah yang mencapai target pekerjaan; sarana dan prasarana kerja pegawai belum lengkap; koordinasi

kerja antar unit dalam organisasi belum padu; penggunaan aplikasi kerja masih sulit diaplikasikan; dan tuntutan pekerjaan yang tinggi menimbulkan stres kerja.

Berdasarkan latar belakang masalah, tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebijakan *work from home* dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri?
2. Apa hambatan dalam penerapan kebijakan *work from home* dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri?
3. Apa upaya yang dilakukan guna mengefektifkan penerapan kebijakan *work from home* dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri?

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan pegawai Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sedangkan objek penelitian ini adalah penerapan kebijakan *work from home* pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang yang berasal dari satuan kerja Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Biro Administrasi Pimpinan. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Basrowi dan Suwandi (2008:209), yang mencakup tiga kegiatan yang bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) membuat Indonesia melakukan penetapan pandemi di seluruh wilayahnya. Hal tersebut juga yang mendorong pemerintah mengambil kebijakan dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus ini dengan melakukan beberapa tindakan seperti salah satunya dengan pemberlakuan *social and physical distancing* (pembatasan interaksi antar individu dengan menerapkan jarak). Menindaklanjuti Instruksi Presiden dan situasi yang terus berkembang terkait penyebaran Covid-19, Kementerian Dalam Negeri juga menerapkan kebijakan *Work from Home* bagi seluruh jajarannya baik di pusat maupun di daerah melalui beberapa Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), diantaranya Inmendagri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; Inmendagri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali; dan beberapa Inmendagri lanjutan lainnya.

Hasil penelitian tentang penerapan kebijakan *work from home* dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan di Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan bahwa dasar hukum penerapan kebijakan *work from home* pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, mengacu pada Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1.

Penerapan kebijakan *work from home* pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sudah sesuai dengan surat tugas yang dibuat bagi setiap pegawai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pelaksanaan *work from home* juga berjalan secara fleksibel

disesuaikan dengan beban kerja masing-masing pegawai. Adapun korelasi penerapan kebijakan *work from home* dikaitkan dengan kondisi yang ada pada saat itu adalah untuk menekan penyebaran virus Covid-19, khususnya di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan dibuktikan dengan adanya beberapa kegiatan yang dilakukan dengan zoom meeting ataupun melalui *teleconference/video conference*.

Sementara itu pengaruh kebijakan *work from home* terhadap kinerja pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yaitu memberi fleksibilitas bagi pegawai untuk melaksanakan pekerjaan dimanapun dia berada. Hal tersebut didukung oleh kemajuan teknologi (internet) yang sangat membantu meringankan pekerjaan pegawai sehingga pekerjaan dapat diselesaikan meskipun tidak berada di kantor.

Kemudian hambatan yang ditemukan dalam penerapan kebijakan *work from home* pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, antara lain masih banyak pekerjaan yang secara administratif belum bisa dilaksanakan secara daring, koordinasi kerja antar unit menjadi terkendala, dan perbedaan suasana kerja antara bekerja di kantor dengan bekerja dari rumah.

Selanjutnya upaya yang dilakukan guna meningkatkan kinerja pegawai selama penerapan kebijakan *work from home* pada Biro Administrasi

Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, antara lain dengan memperhatikan *work-life balance* pegawai, menghindari kontrol yang berlebihan terhadap kegiatan pegawai, adanya garansi akses terhadap perangkat teknologi, dan adanya evaluasi kinerja pegawai secara berkala.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salain, dkk (2020), yang melakukan penelitian tentang dampak kebijakan *work from home* pada kinerja karyawan BUMN di wilayah Denpasar di masa pandemi Covid-19. Hasil dari penelitiannya adalah konsep *work from home* memberikan kelebihan dan kekurangan bagi karyawan. Kelebihan yang dimaksud adalah karyawan dapat menghemat biaya transportasi sehingga hal ini dimanfaatkan untuk mengalihkan pengeluaran transportasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sedangkan kekurangan *work from home* dalam hal ini baik dari segi biaya internet, distruksi suasana rumah dan menurunnya tingkat motivasi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Penelitian lain yang senada adalah penelitian yang dilakukan oleh Ashal (2020), yang melakukan penelitian tentang pengaruh *Work from home* terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Dari hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan *Work from Home* di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI

Medan berjalan dengan baik, tidak ditemukan faktor penghambat yang terlalu berarti terhadap kinerja dan kinerja para pegawai tetap terjaga dengan tetap mengedepankan pelayanan prima dan tidak mengesampingkan protokol kesehatan yang ada.

SIMPULAN

Berdasarkan data dan analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan *work from home* dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan di Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dapat dilihat dari temuan-temuan sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan *work from home* pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sudah sesuai dengan surat tugas yang dibuat bagi setiap pegawai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pelaksanaan *work from home* juga berjalan secara fleksibel disesuaikan dengan beban kerja masing-masing pegawai. Adapun korelasi penerapan kebijakan *work from home* dikaitkan dengan kondisi yang ada pada saat itu adalah untuk menekan penyebaran virus Covid-19, khususnya di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan dibuktikan dengan adanya beberapa kegiatan yang dilakukan dengan zoom meeting ataupun

melalui *teleconference/video conference*.

2. Hambatan yang ditemukan dalam penerapan kebijakan *work from home* pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, antara lain masih banyak pekerjaan yang secara administratif belum bisa dilaksanakan secara daring, koordinasi kerja antar unit menjadi terkendala, dan perbedaan suasana kerja antara bekerja di kantor dengan bekerja dari rumah.
3. Upaya yang dilakukan guna meningkatkan kinerja pegawai selama penerapan kebijakan *work from home* pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, antara lain dengan memperhatikan *work-life balance* pegawai, menghindari kontrol yang berlebihan terhadap kegiatan pegawai, adanya garansi akses terhadap perangkat teknologi, dan adanya evaluasi kinerja pegawai secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashal, Rezeky Ana. (2020). "Pengaruh *Work From Home* terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Volume 14, Nomor 2*.
- Busyra, Sarah dan Lutfiah Sani. (2020). "Kinerja Mengajar dengan Sistem *Work From Home* pada Guru di SMK Purnawarman Purwakarta." *Jurnal Pendidikan Islam. Vol 03 No 01*.

- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Crosbie, Tracey and Moore, Jeanne. (2014). "Work-Life Balance and Working From Home." *Social Policy & Society*, 3(3), 223-233. *Psychology Section*.
- Dunn, William N. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Furchan, Arif. (2011). *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta:
- Krisnanto, Adi dan Dedi Rianto Rahadi. (2021). "Work From Home terhadap Kinerja Karyawan pada Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal Manajemen Bisnis. Volume 18, Nomor 1*.
- Mungkasa, Oskar. (2020). "Bekerja Dari Rumah (*Working From Home*) Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19." *The Indonesian Journal Development Planning. Vol IV No 2*.
- Novalia, Uun H. (2020). "Pemberlakuan *Work From Home* dan Dampak Ekonominya Bagi Pengemudi." *Jurnal Simetri Rekayasa. Vol 02, No 01*.
- Salain, Putu Pradiva Putra dkk. (2020). "Studi Eksplorasi Dampak *Work From Home* pada Kinerja Karyawan BUMN di Wilayah Denpasar di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Satyagraha. Vol. 03, No. 2*.
- Suandi, I Wayan. (2011). "Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali. Vol. I No. 01*.
- Suspahariati, Ririn Susilawati. (2020). "Penerapan Sistem WFH (*Work From Home*) dan Dampaknya terhadap Kinerja Staf dan Dosen Unipdu Jombang selama Pandemi Covid-19." *Dirāsāt: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 2*.
- Tuti, Retnowati WD. (2020). "Pengemudi Transportasi *Online* di Indonesia." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. Vol 3, No 1*.